

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini mendeskripsikan komunikasi politik Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming, sebagai kepala daerah termuda di Kalimantan Selatan. Studi ini dilakukan karena saat dilantik pada 20 September 2010, Mardani adalah bupati termuda di Indonesia dalam usia 29 tahun (Merdeka, 2014). Sebagai bupati termuda yang tak memiliki pengalaman birokrasi, Mardani memanfaatkan hobinya berpetualang dengan sepeda motor trail untuk berkomunikasi langsung dengan warganya. Karena itu, penelitian ini menjadi menarik untuk mengetahui bagaimana komunikasi politik Bupati Tanah Bumbu.

Kepemimpinan merupakan salah satu wacana penting yang selalu dibicarakan dalam kaitan dengan hampir segala aspek kehidupan manusia. Singkatnya selama masih ada kehidupan dan aktivitas manusia, maka masalah kepemimpinan akan selalu mengemuka. Jika demikian halnya, pelajaran apakah yang sebenarnya dapat diambil dari pergelaran besar sejarah kebudayaan selama ini. Salah satu pertanyaan besar yang selama ini selalu mengedepan ialah apakah kepemimpinan itu berdasarkan hati atau rasio? Pertanyaan yang terkesan klasik ini sebenarnya secara tidak langsung dan tanpa disadari telah “membelah” sikap keyakinan dan keberadaan letak dan posisi dalam memandang kepemimpinan. Satu kelompok memandang kepemimpinan itu harus berangkat dari dan dengan sendirinya tidak bisa dipisahkan dengan hati/keyakinan. Kelompok ini percaya bahwa tuntutan keyakinan ialah sumber terbaik dan utama dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, karena dengan tuntutan keyakinan sajalah sebenarnya kepemimpinan itu mempunyai hakikat makna dan implikasi pengambilan keputusan

terbaik untuk seluruh masyarakat. Kelompok lain justru melihat faktor keyakinan sebagai sumber bencana terbesar bagi kemanusiaan. Contoh terkini adalah intervensi atas Irak. Bush dan Blair secara tegas menyatakan bahwa disamping mempertimbangkan semua informasi dan fakta yang ada, yang tidak kalah pentingnya ialah “berkomunikasi dengan pencipta mereka” hingga sampai pada keputusannya.

Komunikator politik memiliki peran yang penting dalam menyampaikan pesan komunikasi politik. Ada berbagai jenis komunikator politik yang ada mulai dari profesional hingga volunteer. Posisi komunikator politik juga berkembang di dunia. Dalam konteks politik di Indonesia sudah muncul juga. Komunikator politik juga menggunakan teknik *spin* yang biasa juga disebut *spin doctor* Bahkan dengan perkembangan media sosial, profesi promotor juga muncul di media baru ini. Terdapat orang-orang yang dibayar untuk “*ngetwit*”, menyediakan informasi sesuai pesanan, ada pula akun-akun yang dibayar untuk menjadi *buzzer* bahkan manipulator informasi. Itulah perkembangan komunikator politik terbar. Namun yang tak kalah penting dari komunikator politik ialah persoalan kepemimpinan politik. Pemimpin yang bekerja keras, kendati tidak pandai bicara atau berdebat justru bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat luas (Subiakto dan Ida, 2014).

Perubahan konstelasi sistem sosial politik sejak reformasi memberi ruang pada siapa saja untuk menjadi pemimpin. Sistem pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota telah membawa perubahan luar biasa pada semangat otonomi daerah. Tak adanya aturan calon kepala daerah harus berlatar belakang birokrat dan batasan usia yang masih membolehkan calon berumur di bawah 30 tahun, membuat orang muda berambisi mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Di satu sisi fenomena ini memberi kesempatan pada orang muda untuk berkiprah dalam dunia politik dan birokrasi. Orang muda juga memiliki peluang untuk membangun daerahnya dengan semangat kepemudaannya. Namun di sisi lain, banyak juga publik meragukan kemampuan kaum muda yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Sikap pesimis ini muncul karena faktanya banyak calon kepala daerah muda yang tak memiliki pengalaman birokrasi dan pemerintahan. Mereka lebih mengandalkan popularitas sebagai publik figur baik sebagai artis, penyanyi, pengusaha, atau anak dari pejabat dan pengusaha besar.

Sementara aturan sistem pemilihan kepala daerah langsung dibuat dengan semangat otonomi daerah untuk membuat daerah lebih mandiri, lebih maju, dan mampu mengelola sistem pemerintahan yang lebih baik dan bersih (*good governance*), hingga pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk mewujudkan itu tentu saja diperlukan kepala daerah yang menguasai konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Selain memiliki kecakapan dan penguasaan birokrasi yang baik, kepala daerah juga harus memiliki visi dan misi serta jiwa kepemimpinan yang bisa mengayomi, melindungi, dan dapat mengakomodir semua kepentingan masyarakat dan dunia usaha. Pemimpin yang baik harus memiliki integritas, kredibilitas, serta harus bisa menjembatani dan membuka komunikasi dengan semua pihak yang dipimpinnya. Kemampuan mengelola sistem pemerintahan dan jiwa kepemimpinan inilah yang tak dimiliki banyak orang.

Sebab, pemimpin sebagai *leadership* dan pemimpin sebagai kepala sebuah organisasi pemerintahan jelas berbeda. Manajemen pemerintahan yang bersifat kaku, baku, dan terikat aturan pada dasarnya bisa dipimpin siapa saja karena diangkat berdasarkan keputusan, bukan dipilih berdasarkan harapan.

Sedangkan pemimpin sebagai kepala daerah harus bisa memadukan kemampuan manajerial birokrasi pemerintahan, kompetensi komunikasi politik, kepemimpinan transformasional, dan memiliki visi dan misi membangun daerah yang visioner. Itu sebabnya tak semua calon kepala daerah muda yang telah memiliki popularitas sebagai publik figur bisa dengan mudah terpilih sebagai kepala daerah. Sebab, masyarakat sudah cerdas untuk menentukan mana pemimpin yang memiliki visi dan yang hanya sekadar ingin memanfaatkan popularitas semata.

Meski tak banyak calon kepala daerah muda yang memiliki pengalaman dalam mengelola manajerial birokrasi, namun ekspektasi yang tinggi terhadap orang muda membuat masyarakat lebih memilih calon kepala daerah muda untuk memimpin. Mindset masyarakat terhadap calon kepala daerah muda juga sudah berubah positif, karena banyaknya kasus kepala daerah berlatar belakang birokrat yang justru terjerat kasus korupsi.

Demikian pula calon kepala daerah dari pimpinan partai politik lebih banyak mengakomodir kepentingan partai dan bisnis para koleganya daripada kepentingan masyarakat. Sehingga calon yang diusung oleh partai besar tak menjadi jaminan akan bisa meraih simpati rakyat dan memenangkan pemilihan kepala daerah. Sebaliknya, meski calon kepala daerah muda hanya diusung oleh parpol gurem dan tak begitu populer, namun masyarakat lebih melihat pada figur calon yang akan memimpin mereka. Hal ini memberi peluang lebih besar kepada orang muda untuk menjadi kepala daerah karena dianggap lebih akomodatif, lebih terbuka, tak bersifat kaku dan bersikap apa adanya tanpa dibatasi aturan birokrasi dan protokoler pemerintahan.

Calon kepala daerah muda tak hanya dianggap menjadi alternatif pilihan ketika masyarakat sudah apatis dan skeptis dengan calon dari kalangan birokrasi maupun pimpinan

partai politik. Orang muda juga dianggap bisa membawa perubahan yang membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui kebijakan yang bersifat pro rakyat.

Ekspektasi yang tinggi ini membuat orang muda lebih banyak dipercaya meski harus melawan calon incumbent dalam pemilihan kepala daerah. Contoh nyata adalah terpilihnya Jokowi yang menyimbolkan pemimpin muda yang visioner, merakyat, dan apa adanya. Jokowi dianggap mewakili figur pemimpin yang merakyat dan mampu membawa perubahan untuk warga Jakarta. Model kepemimpinan Jokowi yang *blusukan* kini malah banyak ditiru kepala daerah lainnya.

Di Kalimantan Selatan sendiri ada satu kepala daerah muda yang saat terpilih pada tahun 2010 dinobatkan sebagai bupati termuda di Indonesia dalam usia 29 tahun (Merdeka, 2014) . Saat pemilihan kepala daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Mardani H Maming, berhasil mengalahkan calon muda lainnya, Iqbal Yudianoor, dan calon dari kalangan birokrat yang lain. Mardani yang berlatar belakang seorang pengusaha mencalonkan diri sebagai kepala daerah diusung PDIP dan Golkar. Terpilihnya Mardani H Maming dengan usia yang sangat muda saat itu membuat gebrakan baru dalam perpolitikan tanah air, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan. Mardani yang tak memiliki pengalaman birokrasi bisa mengalahkan calon lain yang memiliki segudang pengalaman dan karir birokrat.

Track record Mardani sebagai pengusaha yang relatif bersih membuatnya dipercaya masyarakat Tanah Bumbu untuk memimpin daerah yang banyak dilirik investor pertambangan dan perkebunan ini. Meski saat ini tak lagi menjadi bupati termuda di Indonesia, Mardani yang sudah tiga tahun memimpin Kabupaten Tanah Bumbu dengan demografis penduduk yang heterogen dari suku Bugis (nelayan), Jawa (pertanian) dan Banjar (pedagang), sampai kini masih menjadi bupati termuda di Kalimantan Selatan.

Selama empat tahun Mardani memimpin dan menjalankan roda pemerintahan tak ada pergolakan maupun aksi demonstrasi yang menggoyang kepemimpinannya. Mardani yang berlatar belakang sarjana hukum ini melepas atribut dan aktivitasnya sebagai pengusaha dan lebih fokus memimpin pemerintahan.

Dengan wilayah geografis kecamatan di Tanah Bumbu yang sebagian besar sulit dilewati mobil dan medan yang berat, ia memilih menggunakan sepeda motor trail untuk masuk ke kampung dan desa yang minim tersentuh pembangunan. Mardani yang gemar berpetualang menggunakan sepeda motor trail menjadikan hobinya sebagai sarana untuk menyapa warganya.

Karena itulah, penelitian ini bermaksud mengetahui lebih dalam seperti apa komunikasi politik Mardani sebagai bupati termuda di Kalimantan Selatan, mengingat saat terpilih ia tak memiliki pengalaman birokrasi dan kemampuan mengelola sistem birokrasi pemerintahan.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana komunikasi politik Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming sebagai bupati termuda saat terpilih.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan komunikasi politik Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan kajian komunikasi politik, terutama tentang komunikasi politik dalam konteks birokrasi pemerintahan dan relasinya dengan publik.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kemampuan berkomunikasi seorang kepala daerah muda dalam mengelola dan menjalankan birokrasi pemerintahan, serta bisa mendapatkan gambaran teknik komunikasi dalam menyampaikan kebijakan publik. Penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan masukan model komunikasi yang efektif bagi seorang kepala daerah dalam mengelola birokrasi pemerintahan dan menjembatani komunikasi antara pemerintah dan publik.

